

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pembangunan daerah sudah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah menimbulkan perubahan mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan otonomi daerah. Pengertian otonomi secara bahasa adalah kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kekuasaan. Sedangkan daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu daerah wilayah atau area.

Dengan demikian, pengertian otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu daerah atau wilayah itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungan. Adanya otonomi daerah ini, daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatan untuk daerah, dan peran penting pemerintah daerah diperlukan untuk memajukan daerah dengan cara mengidentifikasi apa saja yang menjadi potensi daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah.

Kota Pariaman yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk dengan berlakukannya Undang-undang No. 12 Tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Pada sisi utara, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Padangpariaman dan sisi sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Potensi pariwisata Kota Pariaman perlu dikembangkan dan dibina secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah Kota Pariaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penerapan visi dan misi pembangunan Kota Pariaman yakni mewujudkan Pariaman sebagai kota wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya, dan agama. Visi itu merupakan kristalisasi kondisi umum yang terjadi di Kota Pariaman, hal ini yang dikejar dan dicapai Pemerintah Kota Pariaman di bawah kepemimpinan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dan Wakil Walikota Genius Umar. Pemerintah Kota Pariaman memerlukan berbagai macam sumber daya, mulai dari sumber daya manusia sampai dengan sumber sarana prasarana. Sehingga visi dan misi Kota Pariaman terwujud sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Dalam mengidentifikasi potensi daerah, beberapa daerah di Indonesia melakukan pembangunan dan pengembangan di bidang kepariwisataan sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah. Kota Pariaman mempunyai potensi bidang kepariwisataan yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai objek wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata minat khusus, dan lain-lain. Mengingat objek wisata yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.

Adapun beberapa kepariwisataan yang berkembang di Kota Pariaman

hingga saat ini :

Tabel 1.1 Objek Wisata yang berkembang di Kota Pariaman

Jumlah Objek Wisata Menurut Kecamatan				
No	Kecamatan	Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi
1	Pariaman Tengah	Pantai Gandoriah	Wisata Alam	Kel. Pasir
		Pantai Cermin	Wisata Alam	Kel. Karan Aur
		Pulau Anso Duo	Wisata Alam	Pulau Anso Duo
		Pulau Tangah	Wisata Alam	Pulau Tangah
		Talao Pauh	Wisata Alam	Desa Pauh
		Kuburan Panjang	Wisata Sejarah	Pulau Angso Duo
		Masjid Tuo	Wisata Sejarah	Kp. Perak
		Pesta Budaya Tabuik	Wisata Budaya	Kel. Pasir
		Rumah Gadang Moh. Sholeh	Wisata Budaya	Kp. Perak
2	Pariaman Selatan	Pantai Sunur	Wisata Alam	Desa Sunur
		Pantai Kata	Wisata Alam	Desa Taluak
		Pulau ujung	Wisata Alam	Pulau Ujung
		Surfing	Wisata Alam	Desa Taluak
		Guci Badano	Wisata Sejarah	Desa Sei.Rotan
		Masjid Tuo Kuraitaji	Wisata Sejarah	Desa balai Kuraitaji
3	Pariaman Timur	Benteng Jepang Sintuk	Wisata Sejarah	Marunggi
		Benteng Sintuk II	Wisata Sejarah	Marunggi
4	Pariaman Utara	Pantai Teluk Belibis	Wisata Alam	Desa padang birik – birik
		Talao Manggung	Wisata Alam	Desa Manggung
		Pulau Kasiak	Wisata Alam	Pulau kasiak
		Penangkaran Penyu	Wisata minat khusus	Desa Manggung

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel diatas menjelaskan dan membuktikan Kota Pariaman memiliki potensi wisata yang sangat baik, potensi ini diharapkan dapat memberikan pendapatan yang sesuai terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pariaman. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pariwisata selama ini Kota Pariaman hanya mengambil retribusi yang mengacu pada Perda Kota Pariaman No. 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjelaskan bahwa Kontribusi dari sektor Pariwisata ke PAD dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 diambil dari:

1. Penyewaan Lapangan
 - a. Untuk kegunaan Komersil
 - b. Untuk kegunaan Sosial
2. Penyewaan Pentas Pantai Gandorah
 - a. Untuk kegunaan Komersil
 - b. Untuk kegunaan Sosial/Pemerintah
3. Penyewaan Pujasera
4. Penyewaan Orgen
5. Penyewaan WC

Sumber pendapatan lainnya juga dari tiket menuju pulau angso duo, tiket tersebut dijual seharga Rp.35.000,- untuk satu orang penumpang dan tiket itu berlaku untuk pulang dan pergi kepulau angso duo.

Berikut Pendapatan Asli Daerah Kepariwisata Kota Pariaman :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi PAD dari sektor Pariwisata di Kota Pariaman Tahun 2010 sampai dengan 2015 :

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2010	Rp.7.150.000,-	Rp.10.000.000,-
2	2011	Rp.7.150.000,-	Rp.12.800.000,-
3	2012	Rp.15.000.000,-	Rp.23.900.000,-
4	2013	Rp.15.000.000,-	Rp.26.700.000,-
5	2014	Rp.25.000.000,-	Rp.45.500.000,-
6	2015	Rp.70.000.000,-	Rp.30.320.000,- (s/d 02 September 2015)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman

Tabel diatas membuktikan kondisi PAD dari sektor pariwisata Kota Pariaman dari tahun 2010 hingga 2015. Setiap tahunnya, target PAD memang mengalami perubahan yaitu mengalami peningkatan akan tetapi perubahan tersebut belum sesuai dengan banyaknya jumlah objek wisata yang berkembang di Kota Pariaman. hal ini juga tidak sesuai dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata di Kota ini, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Wisatawan yang di harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentu dengan segala daya tarik wisata pada objek wisata telah diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman. daya tarik wisata tersebut mempengaruhi terhadap intensitas kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman khususnya ke Pantai Gandoriah dan Pulau Angso Duo.

Berikut jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Pariaman :

Tabel 1.3 Perkembangan Kunjungan Wisatawan

NO	TAHUN	ASAL WISATAWAN	
		Domestik	Mancanegara
1	2007	508,025	44
2	2008	580,665	71
3	2009	609,669	75
4	2010	640,184	79
5	2011	705,500	81
6	2012	750,200	121
7	2013	791,624	34
8	2014	1.233.668	73

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman, 2015

Banyaknya jumlah objek wisata dan jumlah wisatawan jika dihubungkan dengan umur Kota Pariaman yang masih bersifat baru yakni 13 tahun, membuat pemerintah Kota Pariaman mengalami beberapa kesulitan dan kendala dalam mengembangkan objek wisata yang ada. Hal ini telah menjadi perhatian pemerintah setempat. Dengan demikian, sejak tahun 2013 Pemko Pariaman menetapkan 2 (dua) dari sekian banyaknya objek wisata yang akan dijadikan wisata unggulan yaitu Pantai Gandorih dan Pulau Angso duo. Pemko bermaksud agar lebih fokus terhadap upaya pengembangan yang dalam hal ini adalah pembangunan di bidang kepariwisataan.

Salah satu faktor penyebab penetapan ke dua objek wisata ini adalah karena posisinya strategis yang berada sekitar 10 m dari pusat Kota. Posisi ini sehingga mempermudah akses para wisatawan. Oleh karena itu pemko telah memfokuskan objek wisata unggulan tersebut. Sehubungan dengan upaya

pemerintah untuk pengembangan wisata, berawal dari tahun 2010 Pemko Pariaman memulai langkahnya dengan melakukan pembangunan-pembangunan disekitar Pantai Gandoriah dan Pulau Angso duo. tujuannya adalah pembangunan dapat meningkatkan objek wisata sehingga akan terhindar dari rasa bosan atau kejenuhan wisatawan.

Pembangunan yang selama ini adalah dengan membuat manajemen dari hal-hal yang mendukung pelaksanaan pembangunan perencanaan, pengorganisasian dilanjutkan pelaksanaan dari perencanaan dan terakhir adalah pengawasan terhadap yang telah dilaksanakan. Akan tetapi, manajemen tersebut hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran yang muncul ketika diadakan pertemuan-pertemuan pemerintah kota. Pemerintah Kota yang dimaksud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman.

Hal ini dikarenakan, pemko belum memiliki regulasi kepariwisataan padahal ini merupakan landasan atau pedoman terkuat setiap daerah untum melakukan pengembangan pariwisata. Sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang mengatakan pada pasal 8 yaitu perencanaan pengembangan kepariwisataan dapat diatur melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 8 tersebut menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Kemudian, Rencana Induk Pembangunan untuk tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Selain itu, dengan tidak adanya RIPPDA menjadi salah satu faktor yang membuat lambatnya proses penyelenggaraan pembangunan sejak tahun 2013. Jika terus menerus seperti ini maka akan semakin lambat berkembang dan terancam punah secara perlahan dari pandangan masyarakat luas dan pengakuan publik terhadap akan potensi wisata Kota Pariaman. walaupun pemko telah melakukan tahap-tahap manajemen dengan baik dan benar, karena tingkat persaingan antar daerah semakin tinggi.

Hal-hal yang menjadi penyebab lambatnya perkembangan objek wisata pantai gandoriah dan pulau angso duo. sementara kunjungan wisatawan akan terus bertambah membuat pemko pariaman dituntut harus lebih berperan aktif terhadap situasi atau kondisi ini. Jika tidak maka Kota Pariaman akan mengalami kesulitan dan kesemberautan yang lebih banyak lagi serta akan tertinggal jauh dari daerah lainnya. Peran yang dimaksud adalah peran dari masing-masing SKPD yang akan menunjang dan membantu lebih cepat untuk perkembangan pantai gandoriah dan pulau angso duo ini sebagai wisata unggulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Berdasarkan latar belakang di atas dan keterangan yang terjadi sebagaimana di jelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI GANDORIAH DAN PULAU ANSO DUO DI KOTA PARIAMAN”**

Berdasarkan fenomena yang ditemui di lapangan, maka dapat penulis rumuskan masalah pokok yang akan dibahas selanjutnya yaitu bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata pantai gandoriah dan pulau angso duo di Kota Pariaman ?

Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu untuk menganalisa peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata pantai gandoriah dan pulau angso duo di Kota Pariaman ?

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis adalah bahan untuk menambah pengetahuan dan menjadi tambahan ilmu tentang administrasi negara khususnya dibidang kebijakan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat praktis adalah sebagai informasi pembaca dan peneliti lain serta menjadi bahan untuk dinas atau lembaga yang mengembangkan pariwisata dengan optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulisan menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang telaah pustaka , kerangka pemikiran mengenai arti penting kebijakan dan pariwisata, model penelitian dan hipotesis Analisis Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Gandorah dan Pulau Angso duo di Kota Pariaman .

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dari desain penelitian, populasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penarikan sampel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel, pengukuran variabel yang digunakan, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian serta metode pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bab ini mengungkap tentang Sejarah, Struktur, Uraian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca, Universitas.